



PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI

BENDUNGAN SERBAGUNA
WONOGIRI

WONOGIRI SUKSES
SELAMAT DATANG

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, dalam upaya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai dokumen perencanaan tahunan untuk Tahun Anggaran 2026, yang memuat usulan rencana kerja program/kegiatan / Sub Kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh BAPPERIDA dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perubahan Rencana Kerja (Renja) memuat program dan kegiatan/ Sub Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran

berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD.

I.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 175);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 24 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Wonogiri;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Dearah Kabupaten Wonogirio Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156) sebaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susuanan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Negara Dearah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 204);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Wonogiri Nomor 196);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 94 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 94);
14. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2023 Nomor 36);
15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (Rencana Strategis) yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, sehingga Rencana Kerja merupakan dokumen tertulis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai peraturan formal dan mengikat setiap kegiatan dinas artinya semua kegiatan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan dinas senantiasa harus mengacu dan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja.

Dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tahun 2026 ini diharapkan tersedianya Dokumen Rencana Kerja Tahunan sebagai Usulan Rencana Program dan Kegiatan yang mengacu dari Rencana Strategis pada masing-masing Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 adalah :

1. Sebagai arah dan landasan berpijak bagi setiap pelaksanaan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pengawasan.
2. Sebagai pedoman dan acuan bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan tugas-tugas pelaksanaan kegiatan.
3. Sebagai petunjuk operasional pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap personil dinas dalam upaya pencapaian tugas kedinasan

1.4. Sistematika Penyusunan

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, termasuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta tata cara evaluasi dan perubahannya Sistematika Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penyusunan

1.5.

BAB II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenan

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2026 Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Periode 2025-2029.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

BAB.III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah

BAB.IV PENUTUP

4.1. Catatan penting

4.2. Kaidah Pelaksanaan

4.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenan

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2026 Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Periode 2025-2029.

Pengertian Evaluasi Kinerja adalah analisis hasil capaian kinerja untuk mencari hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kegiatan/program dan hasilnya, disamping mengidentifikasi dan memilih permasalahan serta menjelaskan hasil pengukuran kinerja (kegagalan dan keberhasilan). Tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program kegiatan di masa yang akan datang.

Penyusunan Renja harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah juga harus berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, guna memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada tahun 2026, dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja fisik dan keuangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Dinas

pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri telah berupaya optimal. Sebagai contoh pada Program Pendaftaran Penduduk, dari Pagu Anggaran sebesar Rp 85.404.000, realisasi keuangan mencapai Rp 19.528.200 (22,87%) dengan sisa pagu sebesar Rp 65.875.800. Capaian indikator sasaran juga menunjukkan tren positif meski masih dihadapkan pada beberapa kendala operasional di lapangan.

Berikut disajikan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sampai dengan Triwulan II.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan II

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100%	50%	50,00 %
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	50%	50,00 %
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	5 Dokumen	71,43 %
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100,00 %
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	3 Laporan	30,00 %
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun	100%	50%	50,00 %
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang/bulan	140 Orang/bulan	50,00 %

2.12.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20 Dokumen	10 Dokumen	50,00 %
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan SDM perangkat daerah yang sesuai tugas dan fungsi	100%	50%	50,00 %
2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang/tahun	60 Orang	100,00 %
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kinerja administrasi umum	100%	50%	50,00 %
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	7 Paket	50,00 %
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5 Paket	50,00 %
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	10 Paket	41,67 %
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	3 Paket	50,00 %
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6 Laporan	50,00 %
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6 Laporan	50,00 %
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	50%	50,00 %
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6 Laporan	50,00 %
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	2 Laporan	50,00 %
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50,00 %
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	50%	50,00 %
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	9 Unit	50,00 %

2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6 Unit	60,00 %
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	33,33 %
2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	17 Unit	8 Unit	47,06 %
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	93%	49,29 %	53,00 %
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah orang yang tertib administrasi kependudukan	140.000 Orang	99.581 Orang	71,13 %
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	140.000 Dokumen	99.581 Dokumen	71 %
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	6 Laporan	50 %
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	10.000 Dokumen	15.473 Dokumen	155 %
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	100%	50%	50,00 %
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pencatatan sipil	27.500 Kutipan	18.008 Kutipan	65 %
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	27.500 Dokumen	27.500 Dokumen	65 %
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	11 Layanan	6 Layanan	55 %
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	100%	50%	50,00 %
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah ketersediaan informasi administrasi kependudukan	25 Kecamatan	25 Kecamatan	100,00 %
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	2 Laporan	50 %

2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	22 Dokumen	11 Laporan	50 %
-------------------	---	--	------------	------------	------

Berdasarkan hasil tabel 2.1 rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, didapatkan kesimpulan capaian kinerja Tahun anggaran berjalan berupa:

1. Sub kegiatan yang telah memenuhi target / telah dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja yang berhasil menyentuh capaian fisik 100%. Selain itu, Pelayanan Pendaftaran Penduduk juga berjalan dengan capaian menjanjikan di angka 71,13%.
2. Sub kegiatan yang tidak memenuhi target karena belum dilaksanakan secara optimal terlihat pada pencapaian beberapa dokumen layanan seperti Pencatatan Sipil dan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk yang angka fisiknya masih minim. Hal serupa juga terlihat pada Pemeliharaan Gedung Kantor yang baru mencapai 33,33% serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di angka 30,00%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam penyelenggaraan pelayanannya, capaian kinerja dinilai berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah selaras dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Periode 2025-2029.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	Target Kinerja Capaian Renstra	Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra tahun berjalan	Catatan Analisis
1	Persentase kepemilikan dokumen KTP el	99,43%	100%	Telah dilaksanakan
2	Persentase kepemilikan dokumen KK	99,43%	99,81%	Telah dilaksanakan
3	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	88%	100%	Telah dilaksanakan
4	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 tahun)	98,05%	100%	Telah dilaksanakan
5	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	51,50%	55,70%	Telah dilaksanakan
6	Persentase kepemilikan Akta Kematian	89,50%	100%	Telah dilaksanakan
7	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan	90,39%	90,39%	Telah dilaksanakan
8	IKM Perangkat Daerah	87	96,65	Telah dilaksanakan

Secara umum, pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sampai dengan Triwulan II telah dilaksanakan dan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, di mana mayoritas indikator berhasil melampaui target capaian tahunan Renstra. Hal ini didukung oleh berbagai upaya inovatif yang telah dilaksanakan, antara lain perluasan pemanfaatan aplikasi layanan seperti "Telunjuk Sakti",

program jemput bola (pelayanan keliling) ke desa-desa yang sulit dijangkau, serta digitalisasi dan penyederhanaan birokrasi pendaftaran yang membuat layanan lebih mudah diakses.

Keberhasilan pencapaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) di angka 96,65 juga menjadi bukti nyata tingginya responsivitas petugas dan komitmen organisasi dalam mewujudkan pelayanan prima yang membahagiakan masyarakat Kabupaten Wonogiri.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu-isu penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, antara lain:

1. Lemahnya integrasi data antar lembaga.
2. Masih adanya penduduk yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan lengkap.
3. Kurangnya proses pemutakhiran data kependudukan dari masyarakat yang mencakup rekam data dari hasil pelayanan KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Pernikahan, Akta Perceraian, Surat Keterangan Pindah Penduduk, KIA, Surat Keterangan Adopsi anak, ganti nama, dan lain-lain yang harus selalu valid dan mutakhir.
4. Belum optimalnya manajemen penyelenggaraan pelayanan publik administrasi kependudukan yang bersih dan melayani.
5. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi

anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

6. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi sebagai media layanan. Inovasi pelayanan administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan seiring perkembangan kebutuhan masyarakat.
7. Masih ditemukannya beberapa masyarakat yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, di mana perekaman KTP-el menggunakan NIK luar daerah dan NIK Kabupaten Wonogiri tidak dimohonkan untuk dihapus.
8. Adanya dinamika kebijakan nasional terkait peralihan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terdistribusi menjadi SIAK Terpusat yang mengharuskan penyesuaian layanan di daerah.

Dari berbagai permasalahan di atas, dampak yang dihadapi terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah adalah munculnya tantangan berupa tingginya beban kerja sumber daya manusia. Sebagai kabupaten yang terus berkembang secara demografis, pelayanan perekaman kini juga dituntut untuk melayani warga di luar domisili Wonogiri. Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan bebas dari kendala infrastruktur jaringan menjadi tantangan besar bagi pemenuhan target layanan terpadu.

Meskipun demikian, terdapat beberapa peluang yang dapat dioptimalkan. Keseriusan instansi dalam melakukan pendampingan inovasi layanan seperti aplikasi pelaporan mobile dan jemput bola (pelayanan keliling), ditambah dengan penerapan fitur penonaktifan NIK ganda di sistem SIAK, dapat menjadi pendorong efisiensi. Kerja sama dan komunikasi yang lebih intensif dengan lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, serta aparat desa akan membuka ruang bagi pendaftaran penduduk yang proaktif dan partisipatif.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, perumusan isu-isu strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil difokuskan pada peningkatan keandalan sistem layanan kependudukan berbasis digital, penguatan kualitas SDM pengelola data, serta perluasan jangkauan layanan prima dan inklusif guna menjamin seluruh warga negara mendapatkan hak dokumen identitas yang sah secara hukum.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah

Penelaahan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Perubahan Rencana Kerja tahun 2026, kebutuhan prioritas yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri memiliki total pagu indikatif sebesar Rp. 5.080.845.754,- yang dialokasikan ke dalam 4 (empat) program utama, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai indikator yaitu Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah dengan target capaian 100%, didukung oleh 6 kegiatan dengan sumber dana yang berasal dari APBD sejumlah Rp. 4.858.041.754,-. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh 3 sub kegiatan:
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target capaian jumlah 7 Dokumen dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 15.700.000,-
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dengan indikator

Kegiatan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target capaian jumlah 2 Laporan dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 1.000.000,-

- c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan indikator Kegiatan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target capaian jumlah 10 Laporan dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 1.000.000,-

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah didukung oleh 2 sub kegiatan:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dengan indikator Kegiatan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target capaian jumlah 280 Orang/bulan dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 3.401.021.754,-
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Dengan indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan target capaian jumlah 20 Dokumen dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 1.000.000,-

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah didukung oleh 2 sub kegiatan:

- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dengan indikator Kegiatan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan target capaian jumlah 0 Orang/tahun dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 0,-
- b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dengan indikator Kegiatan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target

capaian jumlah 60 Orang/tahun dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 44.500.000,-

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah didukung oleh 6 sub kegiatan:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dengan indikator Kegiatan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target capaian jumlah 14 Paket dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 2.000.000,-
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dengan indikator Kegiatan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target capaian jumlah 10 Paket dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 205.500.000,-
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dengan indikator Kegiatan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan target capaian jumlah 24 Paket dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 7.000.000,-
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Dengan indikator Kegiatan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target capaian jumlah 6 Paket dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 1.000.000,-
- e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Dengan indikator Kegiatan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target capaian jumlah 12 Laporan dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 10.000.000,-
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dengan indikator Kegiatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

dengan target capaian jumlah 12 Laporan dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 30.000.000,-

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung oleh 3 sub kegiatan:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dengan indikator Kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target capaian jumlah 12 Laporan dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 1.000.000,-
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dengan indikator Kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target capaian jumlah 4 Laporan dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 312.000.000,-
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dengan indikator Kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target capaian jumlah 12 Laporan dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 760.320.000,-

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung oleh 4 sub kegiatan:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dengan indikator Kegiatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target capaian jumlah 18 Unit dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 60.000.000,-
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Dengan indikator Kegiatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target capaian jumlah 10 Unit dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 1.000.000,-

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dengan indikator Kegiatan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target capaian jumlah 3 Unit dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 2.000.000,-
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dengan indikator Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target capaian jumlah 17 Unit dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 2.000.000,-

2. Program Pendaftaran Penduduk

Program Pendaftaran Penduduk mempunyai indikator yaitu persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dengan target capaian 93%, didukung oleh 1 kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sumber dana yang berasal dari APBD sejumlah Rp. 85.404.000,-. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk didukung oleh 3 sub kegiatan:

- a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Dengan indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk dengan target capaian jumlah 140.000 Dokumen dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 68.924.000,-
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dengan indikator Kegiatan Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan target capaian jumlah 12 Laporan dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 8.240.000,-
- c. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Dengan

indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dengan target capaian jumlah 10.000 Dokumen dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 8.240.000,-

3. Program Pencatatan Sipil

Program Pencatatan Sipil mempunyai indikator yaitu persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil dengan target capaian 100%, didukung oleh 1 kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan sumber dana yang berasal dari APBD sejumlah Rp. 10.000.000,-. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil didukung oleh 2 sub kegiatan:

- a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Dengan indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting dengan target capaian jumlah 27.500 Dokumen dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 5.000.000,-
- b. Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Dengan indikator Kegiatan Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan dengan target capaian jumlah 11 Layanan dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 5.000.000,-

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai indikator yaitu persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dengan target capaian 100%, didukung oleh 1 kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan sumber dana yang berasal dari APBD sejumlah Rp. 127.400.000,-. Kegiatan Penyelenggaraan

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan didukung oleh 2 sub kegiatan:

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dengan indikator Kegiatan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan target capaian jumlah 4 Laporan dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 2.400.000,-
- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Dengan indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan dengan target capaian jumlah 22 Dokumen dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 125.000.000,-

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. WONOGIRI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.636.100.750,00	5.077.149.754,00	5.080.845.754,00	-1.555.254.996,00							6.636.100.750,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.636.100.750,00	5.077.149.754,00	5.080.845.754,00	-1.555.254.996,00							6.636.100.750,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.636.100.750,00	5.077.149.754,00	5.080.845.754,00	-1.555.254.996,00							6.636.100.750,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah				100 Persen	100 Persen	5.490.639.450,00	4.854.345.754,00	4.858.041.754,00	0,00							5.490.639.450,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dausun				100 %	100 %	6.997.500,00	17.700.000,00	17.700.000,00	10.702.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD DAN DINAS TERKAIT Kab. Wonogiri		6.997.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	4.997.500,00	15.700.000,00	15.700.000,00	10.702.500,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif			4.997.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif			1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif			1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang di usun				14 kali	14 kali	3.602.157.000,00	3.402.021.754,00	3.402.021.754,00	-200.135.246,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD DAN DINAS TERKAIT Kab. Wonogiri		3.602.157.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gap dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gap dan Tunjangan ASN				280 Orang/ bulan	280 Orang/ bulan	3.600.269.000,00	3.401.021.754,00	3.401.021.754,00	-199.247.246,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA AKORASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif			3.600.269.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2025	APSD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	1.888.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-888.000,00	Kab. Wonorejo, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif			1.888.000,00	DINAS KEPERHIDUKUAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan SDM Perangkat Daerah sesuai Tugas dan Fungsi				100 %	100 %	119.145.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00	-74.645.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	ASU BONA ASB/ OPD TERKAIT	119.145.000,00	DINAS KEPERHIDUKUAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.01.2.05.0000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bantustarikan Tugas dan Fungsi																					
			Jumlah Pegawai Bantustarikan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Wonorejo, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif			5.000.000,00	DINAS KEPERHIDUKUAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	150 Orang	114.145.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00	-69.645.000,00	Kab. Wonorejo, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	PERDAPATAN/ASB DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif			114.145.000,00	DINAS KEPERHIDUKUAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Akutansi administrasi umum				100 %	100 %	383.987.950,00	255.500.000,00	255.500.000,00	-128.487.950,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD	383.987.950,00	DINAS KEPERHIDUKUAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Wonorejo, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif			5.000.000,00	DINAS KEPERHIDUKUAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	300.523.950,00	205.500.000,00	205.500.000,00	-95.023.950,00	Kab. Wonorejo, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif			300.523.950,00	DINAS KEPERHIDUKUAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	9.999.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-2.999.000,00	Kab. Wonorejo, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif			9.999.000,00	DINAS KEPERHIDUKUAN DAN PENCATATAN SIPIL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		RKPD 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEBUDAH		APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.12.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	11.945.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-10.945.000,00	Kab. Wonoreg, Samal Kecamatan, Samal KelDesa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penguatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi citra, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuratitas terapan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuratitas terapan dan partisipatif			11.945.000,00	DINAS KEPERLUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.06.0008		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Wonoreg, Samal Kecamatan, Samal KelDesa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penguatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi citra, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuratitas terapan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuratitas terapan dan partisipatif			20.000.000,00	DINAS KEPERLUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SRPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SRPD				12 Laporan	12 Laporan	36.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-6.500.000,00	Kab. Wonoreg, Samal Kecamatan, Samal KelDesa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penguatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi citra, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuratitas terapan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuratitas terapan dan partisipatif			36.500.000,00	DINAS KEPERLUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.08		Penyediaan Jasa Peningkat Urutan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa peningkat urutan pemerintahan daerah				100 %	100 %	1.253.372.000,00	1.089.624.000,00	1.073.320.000,00	-180.052.000,00			Memperkuat penguatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi citra, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuratitas terapan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuratitas terapan dan partisipatif	OPD		1.253.372.000,00	DINAS KEPERLUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Wonoreg, Samal Kecamatan, Samal KelDesa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penguatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi citra, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuratitas terapan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuratitas terapan dan partisipatif			2.000.000,00	DINAS KEPERLUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	312.000.000,00	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00	Kab. Wonoreg, Samal Kecamatan, Samal KelDesa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penguatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi citra, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuratitas terapan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuratitas terapan dan partisipatif			312.000.000,00	DINAS KEPERLUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	936.372.000,00	736.624.000,00	760.320.000,00	-179.052.000,00	Kab. Wonoreg, Samal Kecamatan, Samal KelDesa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penguatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi citra, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuratitas terapan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuratitas terapan dan partisipatif			936.372.000,00	DINAS KEPERLUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peningkat Urutan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah				100 %	100 %	125.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-60.000.000,00			Memperkuat penguatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi citra, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuratitas terapan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuratitas terapan dan partisipatif	OPD		125.000.000,00	DINAS KEPERLUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL			DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026									RKPD PERUBAHAN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Parkiran Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pemeliharaannya				20 Unit	20 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Wonoregi, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGKATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Perabotan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	15.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-14.000.000,00	Kab. Wonoregi, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGKATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi				3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-28.000.000,00	Kab. Wonoregi, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGKATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi				112 Unit	112 Unit	20.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-18.000.000,00	Kab. Wonoregi, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGKATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase cakupan kependudukan dalam pendaftaran penduduk				92,21 %	92,21 %	330.983.800,00	85.404.000,00	85.404.000,00	0,00							330.983.800,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah orang yang telah admnduk				69200 orang	69200 orang	330.983.800,00	85.404.000,00	85.404.000,00	-245.579.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	1. Penduduk wajib KTP, KK, KUA 2. Masyarakat tidak melambatkan pelayanan administrasi 3. Penduduk yang mengajukan pindah		330.983.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGKATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0002 Pencetakan, Peratuaasaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pencetakan, Peratuaasaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				207500 Dokumen	207500 Dokumen	215.672.800,00	88.924.000,00	88.924.000,00	-146.748.800,00	Kab. Wonoregi, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DALIA ALOKASI UMLUM (DALI)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif			215.672.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGKATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																				
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	113.016.000,00	8.240.000,00	8.240.000,00	-104.776.000,00	Kab. Wonoregi, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	PEHAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif			113.016.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGKATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0005 Pencetakan, Peratuaasaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelayanan Pemiswa Kependudukan																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Pencatatan, Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Perilaku Kependudukan</i>				10000 Dokumen	10000 Dokumen	2.295.000,00	8.240.000,00	8.240.000,00	5.945.000,00	Kab. Wonorejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, produksi olafraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif			2.295.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil				100 %	100 %	361.816.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	6,00							361.816.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	<i>Jumlah pelayanan pencatatan sipil</i>				27500 Kubipan	27500 Kubipan	361.816.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-361.816.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, produksi olafraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Seluruh Masyarakat Kabupaten Wonorejo		361.816.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Perakusabahan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Perilaku Penting																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Perakusabahan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Perilaku Penting</i>				27500 Dokumen	27500 Dokumen	118.092.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-113.092.500,00	Kab. Wonorejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, produksi olafraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif			118.092.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			<i>Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan</i>				11 Layanan	11 Layanan	243.123.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-238.123.500,00	Kab. Wonorejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, produksi olafraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif			243.123.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data				100 %	100 %	452.661.500,00	127.400.000,00	127.400.000,00	6,00							452.661.500,00	
	2.12.04.2.03	Penyenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<i>Jumlah ketersediaan informasi administrasi kependudukan</i>				25 kecamatan	25 kecamatan	452.661.500,00	127.400.000,00	127.400.000,00	-325.261.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, produksi olafraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Desa/kelurahan/keloka mudan/OPD/Perbank an dan semua yang terkait dengan data Adminduk		452.661.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Facilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>				4 Laporan	4 Laporan	233.971.500,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-231.571.500,00	Kab. Wonorejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, produksi olafraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			219.661.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			<i>Jumlah Dokumen Penyenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan</i>				22 Dokumen	22 Dokumen	218.690.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	-93.690.000,00	Kab. Wonorejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, produksi olafraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif			233.060.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			J U M L A H						6.636.100.750,00	5.077.149.754,00	5.080.845.754,00	-1.555.254.996,00							6.636.100.750,00	

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan penting

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan Rencana Kerja Tahun 2026, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Dengan Program sejumlah 4, Kegiatan 9, ditambah Sub Kegiatan 27 ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Bapperida dan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 merupakan penjabaran Renstra 2021-2026 dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2021 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026. Dokumen renja ini merupakan pedoman Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 – 2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026;

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari Dokumen Renstra terutama pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021 – 2026 Yakni Mewujudkan Wonogiri Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera dengan semangat Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri Go nyawiji Migunani.